



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 31 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SUHARTA**
2. Jabatan : **PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN**
3. NHK : **77062**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 2.504.800.000

1. Tanah Seluas 988 m2 di KAB / KOTA SUKOHARJO, HASIL SENDIRI Rp. 296.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/200 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 1.100.000.000
3. Tanah Seluas 1238 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 389.400.000
4. Tanah Seluas 264 m2 di KAB / KOTA SUKOHARJO, WARISAN Rp. 224.400.000
5. Tanah Seluas 394 m2 di KAB / KOTA SUKOHARJO, HASIL SENDIRI Rp. 495.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 8.250.000

1. MOTOR, YAMAHA MIO SEPEDA MOTOR Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000
2. LAINNYA, ---(SEPEDA) SEPEDA Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 450.000
3. LAINNYA, ---(SEPEDA) SEPEDA Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 300.000
4. MOTOR, YAMAHA JUPITER MX KING Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000



C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	9.850.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	264.272.301
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	2.787.172.301
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.787.172.301

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.